

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lima Puluh Kota menggunakan pendekatan *Value for Money* yang meliputi aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas pada periode tahun 2021–2024, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari aspek ekonomi, pengelolaan anggaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan selama tahun 2021–2024 secara umum berada pada kategori ekonomis, karena seluruh nilai persentase capaian berada di bawah 100%. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi anggaran lebih rendah dibandingkan dengan anggaran yang direncanakan tanpa mengurangi pelaksanaan kegiatan utama. Meskipun demikian, masih terdapat fluktuasi capaian ekonomi antar tahun yang mengindikasikan perlunya pengendalian dan perencanaan anggaran yang lebih konsisten
2. Dari aspek efisiensi, secara umum sebagian besar program dan kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan telah dilaksanakan secara efisien, ditunjukkan oleh nilai persentase di atas 100% pada sebagian besar kegiatan selama periode 2021–2024. Namun demikian, masih ditemukan beberapa kegiatan yang dinilai tidak efisien, khususnya pada tahun 2021 dan 2024, di mana capaian fisik belum sebanding dengan realisasi anggaran yang dikeluarkan. Ketidakefisienan tersebut terutama disebabkan oleh kelemahan dalam perencanaan anggaran, seperti penetapan anggaran belanja outsourcing yang terlalu besar dan dilakukan sebelum proses

negosiasi harga selesai, sehingga berdampak pada rendahnya penyerapan anggaran dan kurang optimalnya kinerja keuangan.

3. Dari aspek efektivitas, kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan menunjukkan capaian yang bervariasi. Pada tahun 2021, 2023, dan 2024, nilai rata-rata capaian kinerja berada di atas 100%, sehingga kinerja dinyatakan efektif karena mampu melampaui target yang ditetapkan. Namun, pada tahun 2022 nilai rata-rata capaian sebesar 97% (<100%) menunjukkan bahwa kinerja dinyatakan tidak efektif. Ketidakefektifan tersebut tidak semata-mata disebabkan oleh lemahnya pelaksanaan program, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi internal berupa tunda bayar pada kegiatan pembangunan Posko Pemadam Kebakaran di Banja Loweh. Tunda bayar ini berdampak pada kelancaran pelaksanaan program serta pencapaian indikator kinerja, khususnya yang berkaitan dengan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
4. Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lima Puluh Kota cenderung mengalami perbaikan dan peningkatan dari tahun ke tahun, meskipun masih terdapat kendala pada aspek tertentu yang perlu menjadi perhatian dalam perencanaan dan pengelolaan kinerja di masa mendatang.

5.2 Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan:

1. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan disarankan untuk melakukan optimalisasi kinerja dalam memenuhi tiga aspek *Value for Money* seperti :

- Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran, khususnya pada tahap penyusunan anggaran, agar alokasi belanja lebih realistis dan sesuai dengan kebutuhan riil kegiatan. Perencanaan yang lebih matang diharapkan dapat meminimalkan terjadinya fluktuasi capaian kinerja ekonomi dan efisiensi antar tahun anggaran.
 - Melakukan evaluasi secara berkala terhadap kegiatan yang memiliki capaian efisiensi di bawah 100%. Evaluasi tersebut dapat difokuskan pada kesesuaian antara perencanaan anggaran, pelaksanaan kegiatan, dan capaian output, sehingga permasalahan serupa tidak terulang pada tahun anggaran berikutnya.
 - Untuk melakukan antisipasi terhadap potensi kendala administratif dan fiskal, termasuk risiko tunda bayar, agar tidak berdampak pada pencapaian indikator kinerja. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui penguatan koordinasi internal, pengelolaan jadwal pelaksanaan kegiatan yang lebih adaptif, serta peningkatan komunikasi dengan pihak-pihak terkait dalam proses penganggaran dan pencairan dana.
2. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas periode waktu penelitian sehingga dapat menggambarkan tren kinerja yang lebih panjang dan stabil, sehingga memungkinkan melihat dinamika fiskal terhadap kinerja organisasi perangkat daerah.